

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Ardiansyah, A., Marsidi, M., & Supawanhar, S. (2025). Peranan Badan Permusyawarah Desa (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan Desa Pelajau Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Stia Bengkulu: Committe to Administration for Education Quality*, 11(1), 77-88.
- Auliya,A., Pamungkas, T. Karya. (2024). Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Peraturan Pemerintah Desa Bagon Kecamatan Puger. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol.1 No.1. 15.
- Hartati, R. 2018. Optimalisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Di Kabupaten Pangandaran). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintah*. Vol. 04 No. 04. 114-123.
- Jayanti, N. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Badan Permusyawaratan Desa. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 6(1), 72-90
- Khairani Alawiyah Matondang, Putri Kemala Dewi Lubis , Endang , Fera Daniaty Nababa , Putri Titin Sianturi. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan KualitasPelayanan Publik. Madani: *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol. 2, No. 1. 791-795
- Mawar Dani Ayu Amalliyah, Maria Madalina. (2023). ANALISIS PERBANDINGAN OPTIMALISASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA REJOSARI DENGAN DESA KEMASAN KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO. *Jurnal Hukum Kebijakan Publik*. Vol.7, No.3. 274-281.
- Moh. Zaini, Darwis, Royyan Fadli, Kismiatun. (2024). Pemberdayaan UMKM, Pasar Desa dan BUMDesa Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Pangurayan. *Journal of Economic Community Service*. Vol. 2, No.2. 85-94.

- Upi Aman Lahagu, Rehmuli Karo-Karo, Besti Rohana Simbolon, & Ilham Fadhly. (2024). Peranan Pemerintahan Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Governance Opinion*. Vol. 9, No.2. 130-139
- Uway, V. I,amuel., Watulingas, R., Palilingan, T. K. R. 2024, “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa”, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol 12 No. 04, Hal 1-15.

SKRIPSI

- Abadi, S. Jaya. 2018, “*Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Legalisasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar. Indonesia.
- Sodikin, Citia Ramona. 2015. *Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Pakon Sukanegara Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Lamung*. Tesis. Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia.
- Sodikin, Citia Ramona. 2015. *Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Pakon Sukanegara Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Lamung*. Tesis. Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia..

BUKU

- Absori, Kelik Wardiono, dan Natangsa Subakti. (2021). *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Akhmad Marisi. (2016). *Pemerintahan Desa dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Deepublish.
- AW Widjaja. (1999). *Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pemerintahan Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Bastian Indra dkk, 2018, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Andi.
- Fachrurisa Hasibuan. (2018). *Pemerintahan Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*, Medan: Penerbit Pustaka Bangsa Press

- Handoko, T. Hani. (2012). *Manajemen*, Edisi 2, Yogyakarta: BPFE.
- Hanif Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Malayu S.P. Hasibuan. (2014). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moch. As'ad. (2000). *Psikologi Industri: Seri Ilmu Sumber Daya Manusia*, Edisi Keempat, Yogyakarta: Liberty.
- Ni'matul Huda. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press
- Nurcholis. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance: Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Reza Banakar dan Max Travers (eds.). (2005). *Theory and Method in Socio-Legal Research*, Oxford: Hart Publishing.

PERUNDANGAN

- Kabupaten Sukoharjo, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa, Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 5, Ketentuan Umum/Pasal definisi mengenai Pemerintah Desa. Permendagri Nomor 73 Tahun 2020.
- Kabupaten Sukoharjo, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 255, Pasal 44 dan Pasal 45.

Lampiran 1 Peraturan Desa Kenokorejo Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kenokorejo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Desa Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024

Peraturan Bupati Sukoharjo No. 70 Tahun 2019 Tentang Penetapan Batas Desa Se-Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, Pasal 19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 20 ayat 1, BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa – Menjelaskan peran, wewenang, serta mekanisme kerja BPD dalam pemerintahan desa.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, Pasal 1 angka 4

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89, Pasal 31.